

**LUDER'S CONTINGENCY MODEL DALAM KEBIJAKAN UTANG
LUAR NEGERI INDONESIA DAN FILIPINA**

Full paper

Ratnawaty

Universitas Airlangga
ratnatrenggalek@gmail.com

Anggun Anita Sari

Universitas Airlangga
anjunmoy@yahoo.co.id

Hindira Widiastri

Universitas Airlangga
hindira_widiastri@yahoo.co.id

Mahirsyah Pradana

Universitas Airlangga
mr.1712@gmail.com

Indrawati Yuhertiana

Universitas Airlangga
yuhertiana@gmail.com

Abstract : *This study describes the government accounting innovation by Luder's Contingency Model that associated with the policy of foreign debt of Indonesia and the Philippines. The purpose of this study in order to compare the foreign debt policies in force in both countries. This study analyzed qualitatively using secondary data collected time-series. The research object is the policy of the state debt of the Philippines and Indonesia. The subject of research in this paper is the country's debt policy makers the Philippines and Indonesia in this case is the Government and the Central Bank of each country. The results of this study indicate that there is a connection between stimuli, users, producers and barriers in foreign debt policy. Stimuli is financial conditions that led to Indonesia and the Philippines do foreign debt. consequently the two countries are bound by the provisions of the creditors, including the intervention of the lender in economy. The role of accounting innovation is to present foreign debt information required by the creditor. Study about Luder contingency model is expected to improve government accounting innovation so as to produce financial information that is informative and accountable primarily related to foreign debt information.*

Keywords : *Luders Contingency Model, public sector accounting reform, Foreign Debt, Debt Policies*

1. Pendahuluan

Utang merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam menutup kekurangan pendapatan negara. Dalam penerapan sistem penganggaran defisit, utang dipilih karena relatif lebih mudah dalam mengendalikan resiko dengan tingkat fleksibilitas segi waktu, jenis dan sumbernya lebih tinggi dan kapasitasnya yang besar. Berdasar Teori Bantuan Luar Negeri Pearson Payaslian (1999), terdapat 4 teori yang mendasari bantuan luar negeri. Pertama menurut aliran realisa bahwa bantuan luar negeri merupakan komponen penting bagi kebijakan keamanan Internasional. Kedua, teori ketergantungan bahwa negara kaya memberikan bantuan untuk mempengaruhi hubungan domestik, mengeksploitasi negara penerima bantuan. Teori ketiga aliran idealis menyatakan bahwa bantuan luar negeri secara esensi merupakan bentuk kemanusiaan. Dan keempat teori *bureaucratic incrementalist* menganggap bantuan luar negeri merupakan kombinasi tujuan kemanusiaan, geopolitik, ideologi, kepentingan komersil, lingkungan dan beberapa faktor politik domestik. Bantuan luar negeri khususnya dari Amerika ke Indonesia pernah diteliti oleh Vaughn (1978), dan cenderung memiliki motif kedua dalam teori diatas yaitu agar pemerintah tidak dapat membangun perekonomian dengan independen. Selain itu berdasar penelitian Mahdavi (2004a), efek beban utang luar negeri memberi dampak pada perubahan-perubahan komposisi belanja negara. Lebih lanjut Sadia Shabbir dan Hafiz M. Yasin (2015) mengemukakan bahwa kewajiban utang berdampak negatif terhadap belanja sektor sosial terutama pendidikan dan kesehatan. Pinjaman luar negeri Indonesia yang salah satunya berasal dari *International Monetary Fund* (IMF) pun bukan tanpa syarat, IMF dan kreditor lain memberikan sejumlah konsekuensi yang menyebabkan beberapa perubahan kebijakan khususnya kebijakan akuntansi, yang akan diteliti lebih mendalam menggunakan *Luder's Contingency Model*.

Luder's Contingency Model adalah sebuah model/kerangka kerja/konsep dasar yang dikembangkan oleh Luder pada tahun 1992 dengan tujuan memahami perubahan akuntansi disektor publik & memberikan penjelasan bagaimana reformasi akuntansi pemerintahan bisa terjadi di banyak negara secara teoritis dan kontekstual. Model ini akan digunakan peneliti untuk menganalisis kebijakan utang luar negeri Indonesia dan Filipina. Sebagaimana kita ketahui Indonesia dan Filipina bagaikan saudara kembar. Selain bentuk fisik penduduk yang sangat mirip, keduanya memiliki sejarah dan geografis yang serupa dan merupakan debitur IMF serta cenderung memiliki indikator

ekonomi dan pemerinkatan yang sejajar baik dalam tingkat korupsi, rasio utang luar negeri dan indeks lainnya. Diharapkan dengan perbandingan yang *apple to apple* dapat ditemukan pola yang sama dalam hasil analisis.

Motivasi penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana utang luar negeri berpengaruh bagi kebijakan pemerintah kedua negara berkembang ini. Apakah kebijakan kedua negara mampu menyelamatkan diri dari *debt trap* atau setidaknya dapat mengurangi ketergantungannya pada utang luar negeri. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan *Luder's Contingency Model* dalam melakukan analisa dengan meninjau aspek *stimuli, barrier* dan *implementation*.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana *Luder's Contingency Model* dalam kebijakan utang luar negeri Indonesia dan Philipina? Tujuan penelitian ini untuk menganalisa *Luder's Contingency Model* dalam kebijakan utang luar negeri Indonesia dan Filipina. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para akademisi sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai kebijakan utang luar negeri pemerintah.

2. Landasan Teori

Pada zaman Filipina dipimpin oleh Presiden Ferdinan Marcos banyak terjadi korupsi dan hutang negara bertambah banyak sehingga terjadi revolusi menggulingkan Presiden Ferdinan Marcos oleh Corazon Aquino. Pada zaman Corazon Aquino demokrasi dipulihkan, mencoba mengatasi hutang dan korupsi serta memerangi pemberontakan komunis (Karnow, 2010). Krisis keuangan Fhilipina disebabkan oleh adanya guncangan eksternal dan guncangan internal. Guncangan eksternal berupa meningkatnya harga minyak dunia, merosotnya komoditi impor dan meningkatnya bunga utang luar negeri. Sedangkan guncangan internal berupa krisis politik (Remolona, Mangahas, & Pante, 1986).

Krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1997 – 1998 adalah krisis mata uang yang berlanjut kepada krisis keuangan/moneter yang lebih jauh berlanjut kepada krisis kepercayaan dan krisis politik (Robison & Rosser, 1998). Krisis di Indonesia juga dipengaruhi oleh krisis Asia. Empat tahap krisis Asia 1997, antara lain : pertama adalah kurs runtuh, kedua kegagalan bank dan kebangkrutan perusahaan dimana biaya lebih tinggi akibat selisih kurs, ketiga resesi domestic dimana konsumsi dan investasi turun drastic dan kenaikan pengangguran, keempat reaksi politik akibat kemerosotan

ditandai dengan kerusuhan sipil dan sentimen anti asing (Wade, 1998). Terdapat lima hal penting untuk menghidupkan kembali perekonomian di Indonesia yaitu: stabilitas politik, sistem perbankan, restrukturisasi hutang, ekspor dan anggaran defisit (Radelet, 2000).

Menurut Wardhono dan Qoriah (2014), gejala ekonomi akibat krisis utang menyebabkan guncangan pada pasar keuangan di Filipina dan Indonesia ditandai dengan fluktuasi pinjaman bank internasional dan fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi rasio utang pemerintah melalui optimalisasi utang, restrukturisasi lembaga di Filipina dan Indonesia. Selain itu, perlu untuk menerapkan strategi stabilitas keuangan. Motley (1994) menemukan bahwa Utang Luar Negeri tidak signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akram (2015) menemukan bahwa utang publik eksternal memiliki hubungan negatif dengan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan investasi. Utang dalam negeri memiliki hubungan negatif dengan investasi dan hubungan positif dengan PDB riil. Pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap PDB riil. Keterbukaan dan investasi berpengaruh positif terhadap PDB riil. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, Akram (2015) menyarankan beberapa kebijakan, pertama menerapkan kebijakan yang cenderung mengurangi beban utang mereka, dan utang eksternal tidak boleh untuk mencapai hal-hal yang tidak berkelanjutan. Kedua, pemerintah harus mengawasi utang dalam negeri untuk investasi. Ketiga pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian populasi termasuk penggunaan kontrasepsi, kesehatan aborsi, promosi emigrasi dan sterilisasi. Keempat, pemerintah menerapkan kebijakan keterbukaan dan yang mendukung investasi. Azam, Emirullah, Prabhakar, dan Khan (2013) menemukan bahwa Rasio Total Utang Eksternal terhadap berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat Inflasi atau PDB deflator berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, Rasio Total Tabungan dalam suatu negara terhadap PDB berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Jaringan Telepon per 100 orang, (TEL) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah wajib berhati-hati dan selektif dalam memotong komponen pengeluaran untuk meringankan utang selama periode penghematan fiskal (Mahdavi, 2004b). Negara-negara berkembang harus memobilisasi sumber daya

mereka sendiri dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada bantuan asing (Sadia Shabbir & Hafiz M Yasin, 2015).

Alam dan Taib (2013) menemukan bahwa defisit anggaran, defisit transaksi berjalan dan nilai tukar mempengaruhi secara signifikan depresiasi utang publik eksternal dari negara. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan negara harus mempertimbangkan faktor-faktor ini saat membuat keputusan tentang pinjaman eksternal. Sotocinal (2015) menemukan bahwa kebijakan fiskal hanya efektif dalam jangka pendek, karena dampaknya dapat menyebabkan kenaikan suku bunga. Karena itu, manajemen ekonomi makro yang efektif memerlukan koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal. Parayno dan Saeed (1993) menyatakan untuk mengurangi tingkat utang melalui penurunan kebutuhan untuk pinjaman luar negeri, tidak perlu menghilangkan beban utang suatu negara. Salah satu contoh kebijakan tersebut adalah membatasi permintaan dengan mengurangi tingkat pertumbuhan, sasaran secara umum dan belanja pemerintah pada khususnya. Agnello dan Sousa (2015) menemukan bahwa kebijakan sektor keuangan kurang ketat meningkatkan tingkat pertumbuhan utang publik. Pelaksanaan reformasi keuangan meningkatkan utang publik, namun tindakan deregulasi keuangan tidak signifikan mengurangi utang publik itu. Pendapatan nasional mampu memikul beban langsung yang berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dan bunganya (*debt service*) dalam bentuk uang kepada kreditur di luar negeri. Manajemen hutang bagus untuk mencegah krisis keuangan (Atmadja, 2004). Qin, Cagas, Ducanes, Magtibay-Ramos, dan Quising (2006) bereksperimen melalui simulasi, hasil menunjukkan bahwa, hingga tahun 2010, utang pemerintah Filipina tidak berkelanjutan alias sederhana. Anggaran kebijakan pengendalian defisit digunakan, bahwa kelayakan tersebut rentan terhadap guncangan merugikan, dan bahwa kebijakan fiskal untuk meningkatkan upaya pajak yang diinginkan untuk mencapai keberlanjutan. Manajer Utang Publik harus mempertimbangkan biaya dan resiko serta eksternalitas dalam menyusun struktur utang publik. Program Penciptaan pada Manajemen Utang dan Sistem Analisis Keuangan (DMFAS) dari UNCTAD dan Program Pengelolaan Utang Sekretariat Commonwealth berguna untuk analisis keberlanjutan utang total dan struktur utang (Panizza, 2008).

Krisis ekonomi yang terjadi di Filipina pada tahun 1986 dan di Indonesia pada tahun 1998 diawali dengan akumulasi utang luar negeri semakin besar, kemudian pertumbuhan ekonomi yang

negatif, selanjutnya krisis nilai tukar terhadap dollar Amerika, sehingga utang luar negeri melonjak drastis dan cadangan devisa tidak dapat memenuhi tagihan pokok utang dan bunga, menyebabkan negara gagal bayar, menyebar ke krisis politik dengan pelengseran kepala negara yang telah lama berkuasa. Dari pelajaran krisis ekonomi yang dialami oleh negara Filipina dan Indonesia, maka masing-masing negara menerapkan kebijakan utang negara, baik utang luar negeri maupun dalam negeri. Penerapan kebijakan tersebut didasarkan dari teori permintaan agregat Keynesian dan teori *public choice*. Penulis di dalam tulisan ini membahas kebijakan utang terutama utang luar negeri di Filipina dan Indonesia, membandingkannya melalui *Lüder's Contingency Model*.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian dilakukan terhadap negara Filipina dan Indonesia pasca krisis ekonomi di kedua negara. Obyek penelitian adalah kebijakan utang negara Filipina dan Indonesia. Subyek penelitian di tulisan ini adalah pembuat kebijakan utang negara Filipina dan Indonesia dalam hal ini adalah Pemerintah dan Bank Sentral masing-masing negara. Penggalan data dilakukan cara dokumentasi data utang baik dari jurnal, publikasi resmi di website kedua negara maupun dari lembaga internasional seperti Worldbank.

Data dikumpulkan secara times series kemudian di analisis secara kualitatif dengan membandingkan data dan kebijakan utang negara Filipina dan Indonesia berdasarkan *Lüder's Contingency Model*. Pengujian kualitas data pada tulisan ini adalah dengan *confirmability*, dimana penulis menggunakan multi sumber bukti (triangulasi) baik dari jurnal–jurnal penelitian tentang utang dan kebijakan utang negara Filipina dan Indonesia maupun publikasi resmi data utang dan kebijakan utang negara Filipina dan Indonesia.

4. Hasil Penelitian

4.1 Kondisi Negara Indonesia

1). Sekilas tentang Pemerintah Indonesia

Indonesia adalah negara republik presidensial yang demokratis. Sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Lembaga Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi.

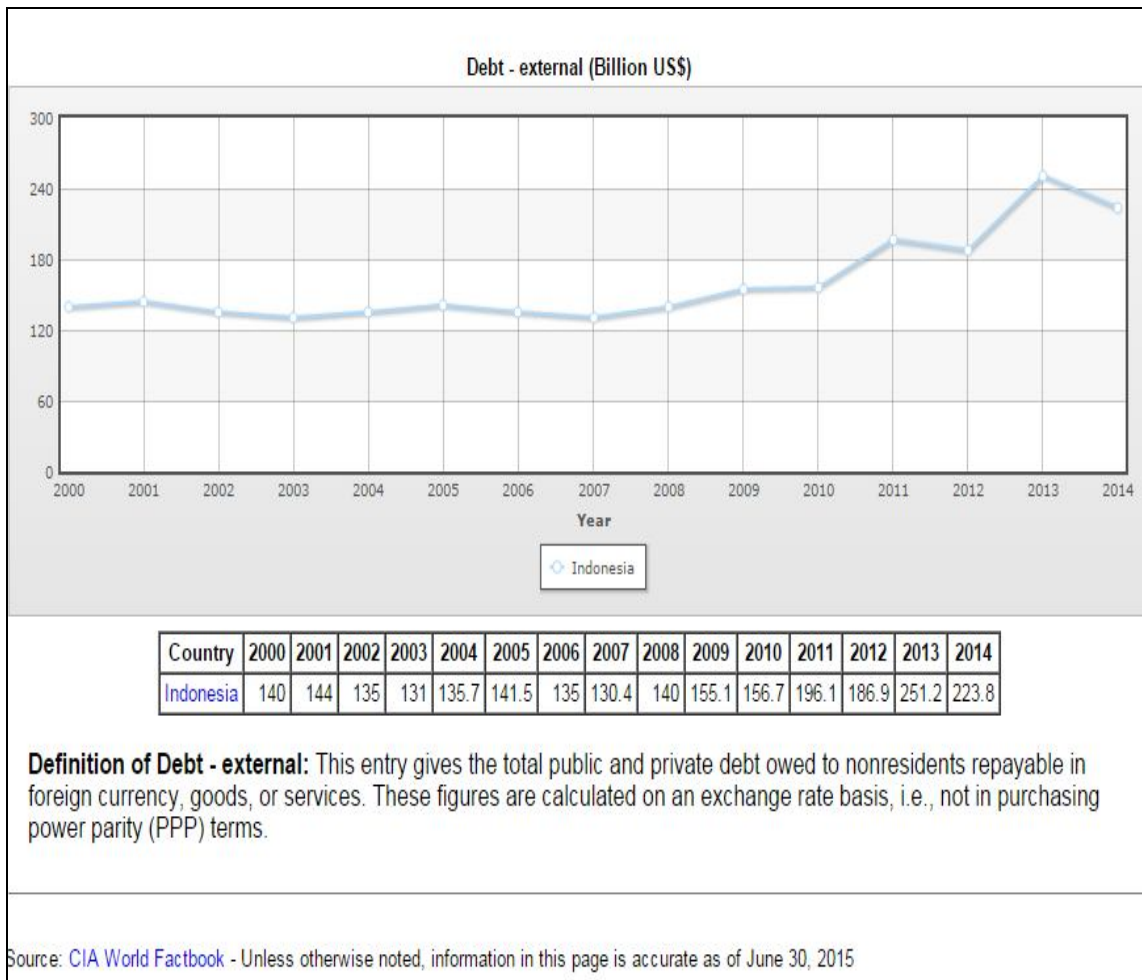
2). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dibentuk berdasarkan pada Keputusan Presiden No.84 Tahun 2004, sebagai tindak lanjut dari amanat Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 pasal 57 tentang Perbendaharaan Negara. KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mulai tahun 2005, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berpedoman pada IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*). Pada tahun 2010 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual penuh (*full accrual accounting*) tidak lagi *cash towards accrual* selambat-lambatnya tahun 2015.

3). Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia sebelum tahun 2015

Utang luar negeri Indonesia cenderung meningkat selama tahun 2000 – 2014. Utang luar negeri Indonesia meningkat dari 140 juta dollar menjadi 223,8 juta dolar. Menurut *indexmundi*, Utang luar negeri Indonesia berada di peringkat nomor 52 di Dunia (data per 1 Januari 2014).

Tabel 1.1. Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia Pasca Krisis Ekonomi



Tabel 1.2. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Pasca Krisis Ekonomi

INDONESIA								
<i>(US\$ million, unless otherwise indicated)</i>								
	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Summary external debt data								
External debt stocks	143,655	141,820	179,395	198,268	219,619	252,555	266,134	293,397
Long-term external debt	110,818	122,649	152,240	162,171	178,405	205,258	216,974	243,948
Short-term external debt	21,688	11,023	24,050	33,047	38,173	44,253	46,110	46,580
interest arrears on long-term	4,632	0	0	0	0	0	0	0
Use of IMF credit	11,149	8,148	3,105	3,050	3,041	3,044	3,050	2,869
Long-term external debt								
Debt outstanding and disbursed	110,818	122,649	152,240	162,171	178,405	205,258	216,974	243,948
Public and publicly guaranteed	69,649	77,405	97,447	103,388	109,786	128,044	129,249	143,068
Official creditors	54,883	59,945	63,259	66,487	66,502	61,518	55,741	50,722
Private creditors	14,766	17,460	34,188	36,901	42,283	66,526	73,508	92,346
of which: Bonds	971	7,192	25,833	29,348	35,501	60,551	67,720	83,838
Private nonguaranteed	41,169	45,244	54,793	58,783	69,620	77,214	87,725	100,880
of which: Bonds	6,337	7,858	7,856	7,787	14,112	9,337	11,121	12,556
Disbursements	5,651	13,881	31,425	34,335	39,430	55,702	50,567	66,221
Public and publicly guaranteed	3,301	5,015	12,729	14,345	9,820	18,942	13,330	21,284
Official creditors	3,038	2,581	6,142	6,587	3,782	3,202	3,883	3,183
Private creditors	263	2,434	6,587	7,758	6,038	15,740	9,447	18,101
of which: Bonds	0	2,095	3,893	5,640	5,775	15,536	8,647	14,219
Private nonguaranteed	2,350	8,866	18,695	19,990	29,609	36,761	37,237	44,938
of which: Bonds	350	194	1,808	195	295	1,470	2,590	1,170
Principal repayments	9,268	15,746	20,432	23,975	25,165	29,527	32,166	37,582
Public and publicly guaranteed	3,864	6,232	7,063	5,846	6,132	6,430	6,088	8,641
Official creditors	1,586	3,539	6,134	5,214	5,156	5,152	5,049	5,014
Private creditors	2,282	2,692	929	632	976	1,278	1,039	3,627
of which: Bonds	0	310	0	0	0	230	0	2,745
Private nonguaranteed	5,404	9,515	13,368	18,129	19,032	23,097	26,077	28,941
of which: Bonds	2,400	267	588	411	1,771	1,560	510	715
Interest payments	5,673	2,933	4,301	4,944	5,532	5,951	7,967	8,140
Public and publicly guaranteed	3,738	1,921	2,802	3,034	3,484	3,475	3,966	4,373
Official creditors	2,575	1,189	1,693	1,586	1,507	1,376	1,170	1,304
Private creditors	1,163	732	1,109	1,448	1,977	2,098	2,796	3,069
of which: Bonds	72	136	837	1,225	1,655	1,811	2,549	2,830
Private nonguaranteed	1,935	1,012	1,499	1,910	2,048	2,477	4,001	3,766
of which: Bonds	735	113	31	81	1,145	1,104	1,083	1,185
Net financial flows								
Net debt inflows	-1,967	-6,611	14,554	19,358	19,391	32,255	20,258	29,109
Official creditors (incl. IMF)	2,575	-2,103	8	1,373	-1,374	-1,950	-1,166	-1,831
Private creditors	-4,542	-4,508	14,546	17,985	20,765	34,205	21,424	30,940
Long-term	-5,069	-906	10,985	8,987	15,639	28,125	19,567	30,470
Public and publicly guaranteed	-2,019	-258	5,658	7,127	5,062	14,462	8,407	14,474
Private nonguaranteed	-3,050	-649	5,327	1,861	10,577	13,663	11,160	15,996
Short-term	527	-3,602	3,561	8,998	5,126	6,080	1,857	470
Net equity inflows								
Foreign direct investment	-4,550	7,812	4,982	12,447	16,278	18,615	20,004	22,108
Portfolio equity	-1,021	-165	787	2,132	-326	1,698	-1,856	3,259
Major economic aggregates								
Gross national income (GNI)	150,317	271,958	520,695	734,396	866,422	891,242	883,425	860,716
Exports of goods, services & prim. income	73,079	97,017	127,243	168,570	215,578	213,656	207,635	200,953
Imports of goods, services & prim. income	66,903	101,533	121,192	168,056	218,103	242,169	240,923	233,658
Primary income on FDI	3,574	9,525	8,848	12,844	17,975	18,166	17,395	19,422
Personal transfers & comp. of employees	1,190	5,420	6,793	6,916	6,924	7,212	7,614	8,551
International reserves	28,502	33,140	63,563	92,908	106,539	108,837	96,364	108,836
Ratios								
External debt stocks to exports (%)	196.6	146.2	141.0	117.6	101.9	118.2	128.2	146.0
External debt stocks to GNI (%)	95.6	52.1	34.5	27.0	25.3	28.3	30.1	34.1
Debt service to exports (%)	22.8	20.9	19.6	17.4	14.4	16.8	19.6	23.1
Reserves to external debt stocks (%)	19.8	23.4	35.4	46.9	48.5	43.1	36.2	37.1

Sumber : WorldBank Publication - International Debt Statistics 2016

4). Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 2015

Utang luar negeri Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 309,450 juta dolar, terdiri dari utang jangka pendek 39,754 juta dolar dan utang jangka panjang 269,696 juta dolar (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia - SULNI, Maret 2016).

4.2 *Kondisi Negara Filipina*

1). Sekilas tentang Pemerintah Pilipina

Filipina adalah sebuah republik dengan bentuk pemerintahan presidensial di mana kekuasaan dibagi sama rata antara tiga cabang : eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Legislatif dipegang oleh Kongres Filipina. Lembaga ini dibagi menjadi Senat dan DPR. Eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh suara langsung dan melayani rakyat dalam jangka waktu enam tahun. Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah yang memegang kekuasaan untuk menyelesaikan kontroversi yang melibatkan hak secara hukum. Cabang ini menentukan apakah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang.

2). Akuntansi Pemerintahan di Filipina

Philippine Interpretations Committee (PIC) membentuk *Philippines Financial Reporting Standards Council (PFRSC)*. PFRSC telah mengadopsi sebagian IFRS, dalam beberapa kasus dengan modifikasi, dan dalam beberapa kasus amandemen terbaru untuk IFRS yang belum diadopsi. Standar-standar ini dikenal sebagai *Philippine Financial Reporting Standards (PFRSs)* and *Philippine Accounting Standards (PASs)* yang berlaku untuk semua entitas dengan akuntabilitas publik.

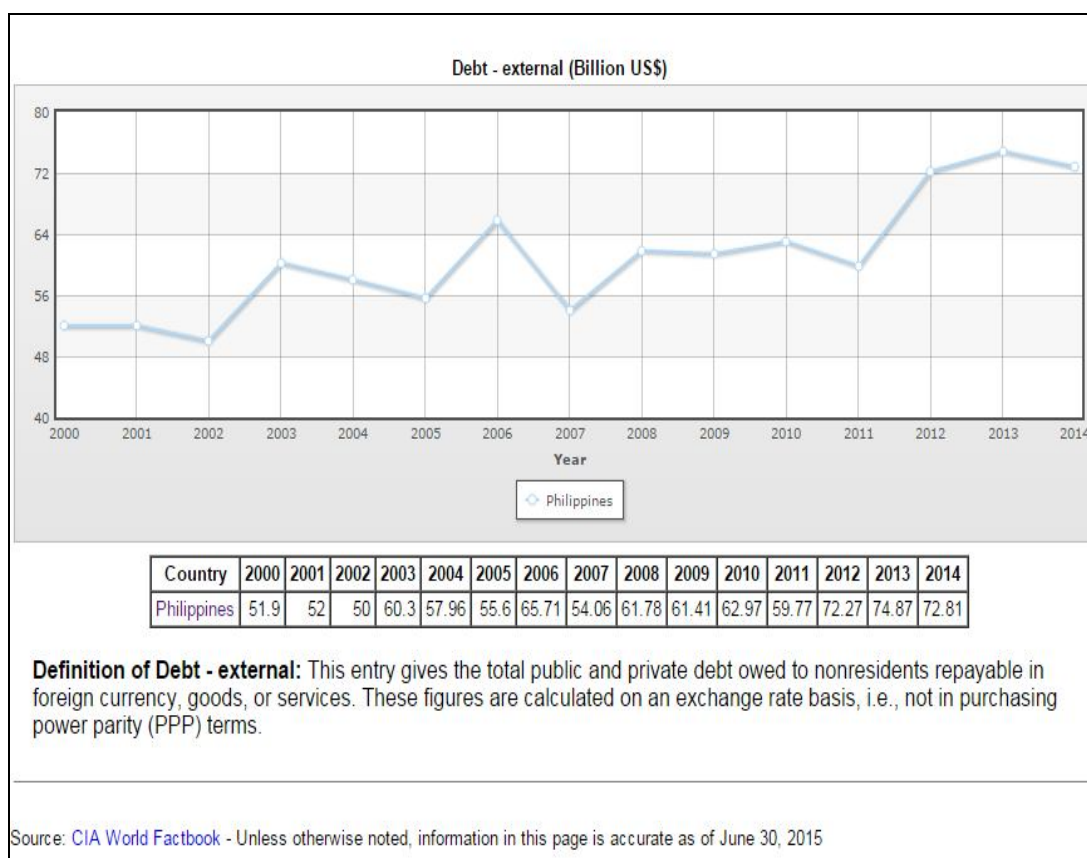
Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Filipina sangat pesat. Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam mengelola dana publik. Pemerintah Filipina bahkan memiliki website khusus, yaitu : <http://pfm.gov.ph/> untuk memantau program reformasi manajemen keuangan publik atau yang disebut dengan istilah *Public Financial Management (PFM)*. PFM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik untuk memastikan pengiriman langsung, segera, substansial dan ekonomis pelayanan publik terutama untuk masyarakat miskin. Program ini mengimplementasikan strategi kunci dari *Philippine PFM Reform Roadmap: Towards Improved Accountability and Transparency (2011-2016)*, yaitu sebuah agenda reformasi yang komprehensif yang bertujuan untuk memperjelas, mempermudah,

meningkatkan dan menyelaraskan proses manajemen keuangan pemerintah dan sistem informasi. sistem yang terintegrasi akan mencakup semua transaksi dari pemerintah dan menerapkan seragam untuk semua instansi pemerintah.

3). Perkembangan Utang Luar Negeri Filipina sebelum tahun 2015

Utang luar negeri Filipina cenderung fluktuatif selama tahun 2000 – 2014. Utang luar negeri Filipina cenderung fluktuatif dari 51,9 juta dollar menjadi 72,81 juta dolar. Menurut indexmundi, Utang luar negeri Fhilipina berada di peringkat nomor 52 di Dunia (data per 1 Januari 2014).

Tabel 1.3. Perkembangan Utang Luar Negeri Filipina Pasca Krisis Ekonomi



Tabel 1.4. Statistik Utang Luar Negeri Filipina Pasca Krisis Ekonomi

PHILIPPINES								
<i>(US\$ million, unless otherwise indicated)</i>								
	2000	2003	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Summary external debt data								
External debt stocks	58,456	58,693	55,986	65,304	66,383	69,874	66,871	77,659
Long-term external debt	50,777	51,742	50,670	53,502	53,046	52,134	48,671	60,197
Short-term external debt	5,495	6,395	4,002	10,512	12,050	16,452	16,909	16,248
Interest arrears on long-term	0	0	0	0	0	0	0	0
Use of IMF credit	2,183	555	1,314	1,290	1,287	1,288	1,290	1,214
Long-term external debt								
Debt outstanding and disbursed	50,777	51,742	50,670	53,502	53,046	52,134	48,671	60,197
Public and publicly guaranteed	33,744	35,364	42,198	45,040	44,902	43,552	39,262	38,014
Official creditors	19,890	18,580	22,054	23,210	23,587	21,934	18,665	17,640
Private creditors	13,855	16,784	20,144	21,831	21,315	21,618	20,597	20,374
of which: Bonds	10,466	14,290	18,901	20,534	20,045	20,470	19,689	19,669
Private nonguaranteed	17,033	16,378	8,472	8,462	8,144	8,582	9,410	22,183
of which: Bonds	2,856	2,975	956	1,651	1,579	2,600	6,250	7,325
Disbursements	5,747	5,544	8,767	10,928	7,954	5,761	4,755	16,579
Public and publicly guaranteed	5,228	3,874	8,124	8,251	4,999	3,828	962	3,355
Official creditors	1,528	1,144	2,349	1,770	1,709	1,436	910	1,809
Private creditors	3,701	2,730	5,776	6,881	3,290	2,392	52	1,546
of which: Bonds	2,630	2,384	5,510	6,680	3,121	2,241	0	1,500
Private nonguaranteed	519	1,670	642	2,677	2,954	1,933	3,793	13,224
of which: Bonds	5	250	1,075	1,525	3,650	1,075
Principal repayments	4,047	5,748	5,675	8,341	6,311	2,725	2,918	3,047
Public and publicly guaranteed	2,515	3,353	3,841	6,813	4,887	2,629	2,767	2,596
Official creditors	1,572	1,788	1,722	1,818	2,007	1,756	2,184	1,552
Private creditors	943	1,566	2,120	4,996	2,880	873	583	1,044
of which: Bonds	395	1,209	1,644	4,807	2,669	655	366	888
Private nonguaranteed	1,533	2,395	1,833	1,527	1,424	96	..	451
of which: Bonds	445	333	339	174	158
Interest payments	2,469	3,152	3,266	3,112	3,195	2,973	2,922	3,045
Public and publicly guaranteed	1,882	2,409	2,841	2,977	2,850	2,844	2,660	2,538
Official creditors	841	584	542	498	489	431	342	294
Private creditors	1,041	1,825	2,299	2,479	2,361	2,414	2,319	2,244
of which: Bonds	880	1,725	2,257	2,441	2,323	2,379	2,289	2,220
Private nonguaranteed	586	743	425	135	345	129	261	506
of which: Bonds	479	283	88	25	147	107	243	385
Net financial flows								
Net debt inflows	2,551	828	93	9,097	3,181	7,437	2,293	12,871
Official creditors (incl. IMF)	261	-961	627	-447	-298	-320	-1,275	257
Private creditors	2,290	1,788	-534	9,544	3,479	7,758	3,568	12,614
Long-term	1,744	439	2,465	3,035	1,941	3,356	3,111	13,275
Public and publicly guaranteed	2,758	1,164	3,656	1,885	410	1,520	-531	502
Private nonguaranteed	-1,014	-725	-1,191	1,149	1,530	1,836	3,642	12,773
Short-term	546	1,349	-2,998	6,509	1,539	4,402	457	-661
Net equity inflows	2,240	1,321	1,886	-214	1,531	2,824	1,084	2,854
Foreign direct investment	-202	420	308	833	1,040	1,753	-34	1,196
Major economic aggregates								
Gross national income (GNI)	94,969	129,804	223,417	265,931	268,494	299,115	326,317	341,481
Exports of goods, services & prim. income	44,060	38,514	49,632	61,241	64,792	75,080	76,206	81,641
Imports of goods, services & prim. income	51,931	48,158	57,753	71,658	77,716	87,631	85,896	91,546
Primary income on FDI	230	1,382	2,202	2,417	2,910	3,955	3,518	4,211
Personal transfers & comp. of employees	6,961	13,733	19,960	21,557	23,054	24,610	26,717	28,403
International reserves	13,090	15,926	38,783	55,363	67,290	73,478	75,689	72,057
Ratios								
External debt stocks to exports (%)	132.7	152.4	112.8	106.6	102.5	93.1	87.7	95.1
External debt stocks to GNI (%)	61.6	45.2	25.1	24.6	24.7	23.4	20.5	22.7
Debt service to exports (%)	16.0	24.7	18.1	18.7	14.7	7.6	7.7	7.5
Reserves to external debt stocks (%)	22.4	27.1	69.3	84.8	101.4	105.2	113.2	92.8
Notes:								
Long-term private nonguaranteed debt data no longer include unregistered debt and are revised from 2005 based on the reports provided by the country.								

Sumber : WorldBank Publication - International Debt Statistics 2016

4). Utang Luar Negeri Filipina Tahun 2015

Utang Eksternal Filipina tahun 2015 adalah sebesar 77,474 juta dollar yang terdiri dari *General Government* 30,812 juta dollar, otoritas moneter 1,337 juta dollar, Perbankan 17,525 juta dollar, Sektor-Sektor lain 24,073 Juta dollar dan *Direct Investment - Intercompany Lending* 3,727 juta dollar (Bangko Sentral NG Philippines, 2015).

4.3 Inovasi Akuntansi Indonesia dan Filipina dalam Luder Contingency Model

Luder Contingency Model adalah sebuah model/kerangka kerja/konsep dasar yang dikembangkan oleh Luder pada tahun 1992 dengan tujuan memahami perubahan akuntansi disektor publik dan memberikan penjelasan bagaimana reformasi akuntansi pemerintahan bisa terjadi di banyak negara secara teoritis dan kontekstual. "*Contingency Theory*" mencoba untuk menjelaskan transisi dari akuntansi pemerintahan tradisional ke sistem yang lebih informatif melalui interaksi dari berbagai faktor sosial, politik dan administratif termasuk hambatan pelaksanaannya. Nama lain Luder Contingency Model adalah "*the Contingency Model of Governmental Accounting Innovations*" dan "*The Model of Financial Management Reform / FMR Model*".

Lüder's Contingency Model memiliki peran penting dalam penelitian tentang reformasi akuntansi pemerintahan di berbagai negara karena model ini berhasil menjelaskan teori dan konteks dari reformasi akuntansi pemerintahan di suatu negara. Namun penelitian yang komprehensif dengan menggunakan Model ini baru dipakai untuk komparasi reformasi akuntansi pemerintahan di negara-negara maju (Amerika Serikat, Kanada, Swedia, Denmark, Inggris, Perancis, Finlandia, Spanyol, Swiss).

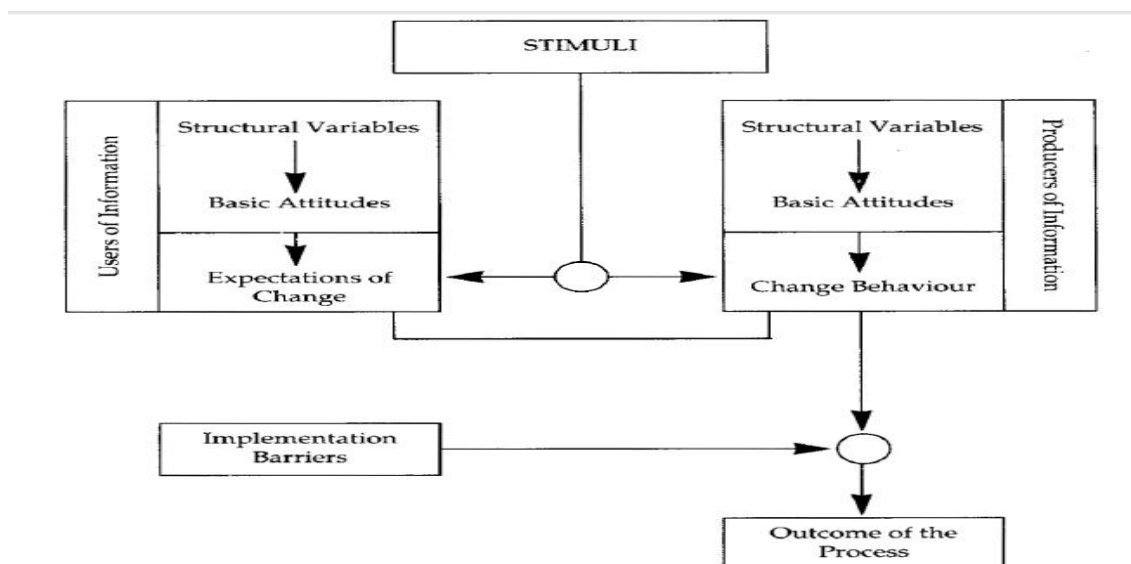


Figure 1. Contingency Model of Public Sector Accounting Innovations - Basic Model

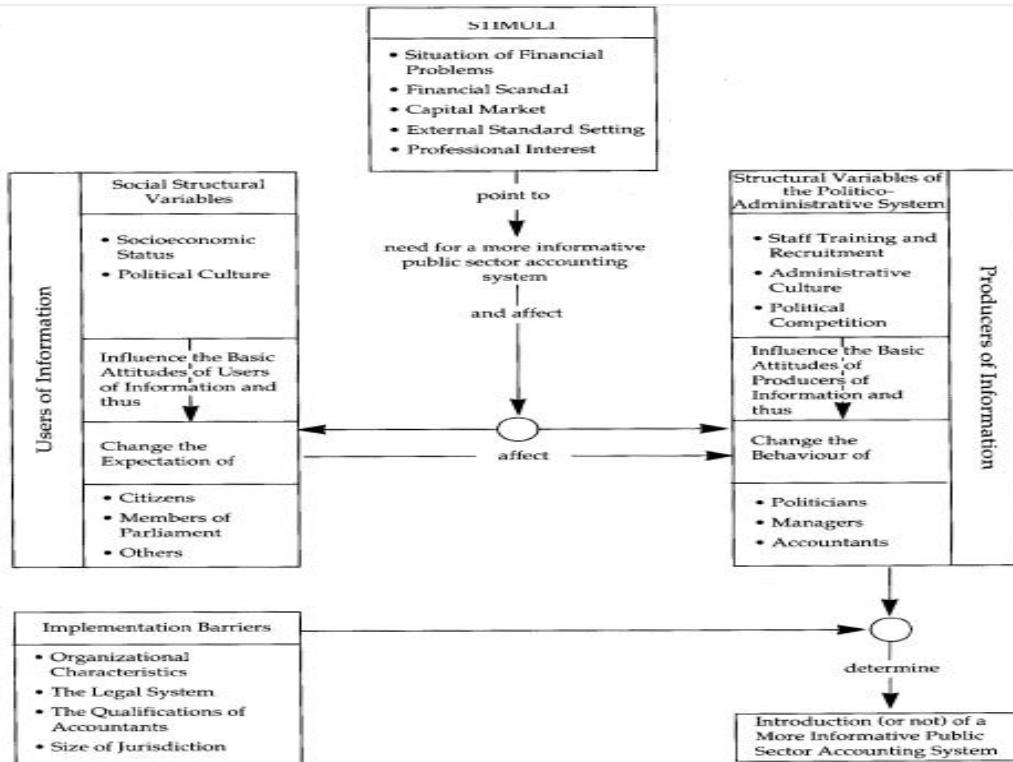


Figure 2. Contingency Model of Public Sector Accounting Innovations – Detailed Model

Proses pertama inovasi akuntansi sektor publik dimulai dari rangsangan yang dapat berasal dari masalah finansial, skandal finansial, pasar modal, pengaturan standar eksternal dan kepentingan profesional. Pihak pembuat kebijakan/produser informasi dalam hal ini pemerintah merespon rangsangan tersebut dengan membuat kebijakan sistem informasi baru yang akan mengubah struktur sistem politik-administratif, membuat kebijakan rekrutmen dan pelatihan staf, mengubah budaya administrasi, mengubah kompetisi politik. Kebijakan baru ini otomatis akan mempengaruhi sikap dasar dari produser informasi dan mengubah kebiasaan dari para politisi, manajer dan akuntan. Kebijakan tersebut juga akan mempengaruhi pengguna informasi melalui sosial ekonomi, dan budaya politik. Selanjutnya, kebijakan tersebut akan mempengaruhi sikap dari pengguna informasi dan mengubah ekspektasi dari pengguna informasi (warga negara, anggota parlemen dan pihak luar pemerintah yang berkepentingan). Oleh karena itu, sebelum diterapkan, pengujian publik harus dilaksanakan untuk mengetahui masukan dari pihak pengguna informasi untuk perubahan yang lebih baik. Selain itu, kebijakan sistem informasi akuntansi baru pasti akan menghadapi hambatan antara lain: Pertama, Hambatan karakter organisasi dimana membutuhkan adaptasi terhadap perubahan

kebijakan. Kedua, Hambatan sistem hukum, dimana membutuhkan sistem hukum yang baru dengan adanya kebijakan baru. Ketiga, Hambatan kualifikasi dari akuntan, dimana membutuhkan pelatihan untuk menerapkan kebijakan baru. Keempat, Hambatan ukuran yurisdiksi, dimana dengan diterapkan kebijakan baru maka akan berdampak pada wewenang dan tanggung jawab pembuat kebijakan. Dengan memperhatikan masukan dari pengguna informasi dan hambatan atas kebijakan sistem informasi akuntansi sektor publik yang baru, maka produser informasi memutuskan menerapkan atau tidak kebijakan baru tersebut. Produser informasi akan menerapkan kebijakan sistem informasi akuntansi publik baru dengan syarat masukan dari pengguna informasi telah ditidakanjuti dan hambatan dapat diatasi.

Tabel 2.1. *Luder's Contingency Model-Stimuli*

<i>Luder 's Contingency Model</i>		
INDONESIA	Stimuli	PHILIPINA
Krisis Keuangan 1997 – 1998 Presiden Soeharto, utang tinggi, korupsi tinggi Pasar modal mulai membaik 1999 di dominasi investor asing Anglo Saxon, berkiblat ke Amerika Serikat, IASB ---IFRS Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh IAI	Situasi Masalah Keuangan Keadaan Pasar Modal Pengaturan Standar eksternal	Kris is Keuangan 1986-1987 Presiden Corazon Aquino, utang tinggi, korupsi tinggi Pasar modal mulai membaik 1988 didominasi investor domestik Anglo Saxon, berkiblat ke Amerika Serikat, IASB ---IFRS Philipina Financial Reporting Standard (PFRS/PAS) yang disusun oleh PFRSC

Stimuli dalam inovasi akuntansi pemerintahan di Indonesia dan Filipina dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu situasi masalah keuangan, keadaan pasar modal, dann pengaturan standar eksternal. Krisis ekonomi Indonesia dan Filipina membuat kedua negara tersebut harus bangkit dari keterpurukan. Dengan dukungan kondisi pasar modal yang mulai membaik dan adopsi sistem akuntansi dari sektor private yang nantinya akan mempengaruhi adopsi dari sektor publiknya.

Tabel 2.2. Luder's Contingency Model-User

<i>Luder 's Contingency Model</i>		
INDONESIA (user)	Social Structure Variabel	PHILIPINA (user)
Debt to GDP Ratio 25,02% (2014), tingkat inflasi 4,45% (2014)	Keadaan Sosial Ekonomi	Debt to GDP Ratio 45,05% (2014) Tingkat inflasi 1,10% (2014)
Negara Hukum, Republik Presidensial, masyarakat adalah penguasa tertinggi	Budaya Politik	Negara Hukum, Republik Parlementer, masyarakat adalah penguasa tertinggi
Catatan : Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya Politik membuat warga negara, anggota parlemen, dan lain-lain merubaha cara pandang mereka sebagai pengguna informasi. Mereka sebagai pengguna informasi berharap adanya sebuah sistem akuntansi sektor publik atau sistem akuntansi pemerintahan yang lebih informatif dan akuntabel		

Luder's Contingency Model ditinjau dari sisi pengguna informasi, diperoleh data tentang variabel struktur sosial yang terdiri dari keadaan sosial ekonomi dan budaya politik. Data keadaan sosial ekonomi Indonesia tahun 2014 adalah Debt to GDP Ratio 25,02% dengan tingkat inflasi 4,45%. Data keadaan sosial ekonomi Filipina tahun 2014 adalah Debt to GDP Ratio 45,05% dengan tingkat Inflasi 1,10%. Keadaan sosial ekonomi dari pengguna informasi membuat inovasi akuntansi sektor publik harus terus ditingkatkan untuk menghasilkan informasi terutama informasi perkembangan akuntansi kewajiban atau utang luar negeri pemerintah terhadap krediturnya. Dalam hal ini budaya politik akan ikut memberikan peran bagi terlaksananya inovasi akuntansi sektor publik tersebut.

Tabel 2.3. Luder's Contingency Model-Producers

<i>Luder 's Contingency Model</i>		
INDONESIA (producers)	<i>Structural Variables of the Politico-Administrative System</i>	PHILIPINA (producers)
Pemilu	Recruitment	Pemilu
Administrasi yang memperhatikan Lingkungan, mengadopsi IPSAS untuk sektor publiknya	Administrative Culture	Administrative Code of 1987, mengadopsi IPSAS untuk sektor publiknya
3 power (eksekutif, legislatif, yudikatif), negara demokrasi, Tidak mempermasalahkan gender dalam pemerintahan, Kebebasan pers	Political Competition	3 power (eksekutif, legislatif, yudikatif), negara demokrasi, tidak mempermasalahkan gender dalam pemerintahan, Kebebasan pers
Catatan : kebutuhan user akan sistem akuntansi pemerintahan yang lebih informatif dan akuntabel harus direspon oleh produser sebagai penyedia informasi dimana producer dalam hal ini adalah Politisi, Manager, Akuntan harus menetapkan peraturan terkait akuntansi pemerintahan dan menyediakan informasi akuntansi berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan tersebut.		
a. Indonesia : SAP oleh KSAP b. Philipina : PPSAS oleh GBES		

Luder's Contingency Model ditinjau dari sisi penyedia informasi, diperoleh data tentang variabel yang mempengaruhi struktur politik dan administrasi baik dari negara Indonesia maupun Philipina. Variabel yang dimaksud adalah Rekrutmen, Budaya Administrasi, dan Persaingan politik. Pertama, untuk rekrutmen struktur politik di Indonesia dan Philipina adalah sama yaitu melalui pemilihan umum (pemilu) karena kedua negara tersebut adalah Negara Republik sehingga pemimpin negaranya dipilih melalui pemilu.. Kedua, untuk budaya administrasi sektor publik di Indonesia dan Philipina adalah sama yaitu mengadopsi dari *International Public Sector Accounting Standar (IPSAS)* dimana di Indonesia bernama SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang dibentuk oleh KSAP (komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sedangkan di Philipina bernama PPSAS (*Philippine Public Sector Accounting Standar*) yang dibentuk oleh GBEs (*Government Business Enterprises*). Ketiga, persaingan politik baik di Indonesia dan di Philipina kekuasaannya sama-sama dibagi menjadi tiga yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Selain itu baik di Indonesia maupun Philipina tidak memperlakukan gender dalam pemerintahan dan pers mempunyai kebebasan dalam meliput suatu informasi. Kebutuhan pengguna informasi akan sistem akuntansi pemerintahan yang lebih informatif harus ditanggapi oleh penyedia informasi dengan menetapkan peraturan tentang akuntansi pemerintahan dan memberikan informasi berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Tabel 2.4. *Luder's Contingency Model-Barriers*

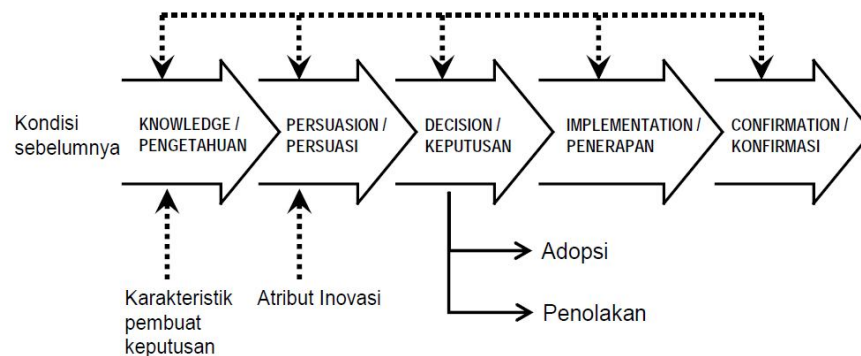
INDONESIA (barriers)	Implementation	PHILIPINA (barriers)
Kebutuhan Sumber daya, Keterbukaan untuk publik, Mencari Keadilan, Birokratis, Formal, Berjenjang	Karakteristik Organisasi	Kebutuhan Sumber daya, Keterbukaan untuk publik, Mencari Keadilan, Birokratis, Formal, Berjenjang
Hukum Formal dan Hukum Material	Sistem Hukum	Hukum Formal dan Hukum Material
Sertifikasi Akuntan secara berjenjang	Kualifikasi Akuntan	Sertifikasi Akuntan secara berjenjang
Mahkamah Agung sebagai lembaga yurisdiksi tertinggi	Ukuran Yurisdiksi	Mahkamah Agung sebagai lembaga yurisdiksi tertinggi

Luder's Contingency Model-Barriers menunjukkan variabel yang dapat berpotensi dalam menghambat inovasi akuntansi pemerintahan, yaitu karakteristik organisasi, sistem hukum, kualifikasi akuntan, dan ukuran yurisdiksi. Dengan kondisi variabel yang sama di kedua negara, maka hambatan inovasi akuntansi pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Karakteristik Organisasi

Karakter organisasi dapat menghambat inovasi karena etika berhadapan dengan setiap jenis perubahan, maka pada umumnya sikap pertama kali yang akan muncul dari individu adalah sikap penolakan. Hal ini sangat erat dengan karakteristik dasar manusia yang tidak menyukai perubahan. Sikap penolakan merupakan bentuk pertahanan diri (survival) yang awal dari segala bentuk perubahan yang berpotensi mengancam kondisi status-quo. Perilaku individu yang menolak maupun menerima perubahan yang terjadi merupakan cermin dinamika yang tidak bisa dihindari dalam sebuah sistem sosial. Solusi untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan mendalami disiplin ilmu yang disebut Perilaku Organisasi sehingga keputusan inovasi dapat diterima dengan mekanisme sebagai berikut :

Gambar 3.1. Proses Keputusan Inovasi



Sumber : Rogers, 2003

Dengan adanya pengetahuan tentang inovasi dan komunikasi yang berimbang tentang inovasi tersebut organisasi akan memutuskan menolak atau mengadopsi inovasi tersebut berdasarkan analisis untung rugi. Ketika memutuskan untuk menerima inovasi pun organisasi akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk mengadopsi sistem tersebut dan berupaya mencari dukungan agar inovasi tersebut bisa berjalan lancar.

2. Sistem Hukum

Sistem hukum disuatu negara dapat menghambat proses inovasi. Sebuah inovasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara membutuhkan legalitas hukum sehingga sistem akuntansi yang diterapkan harus memiliki landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan tersebut. Hambatan terjadi karena saat pasca krisis, Indonesia dan Filipina yang sama-sama negara hukum belum memiliki seperangkat aturan terpadu yang *practically* untuk menjalankan sistem akuntansi pemerintahan yang baru mulai diadopsi saat itu. Selain itu inovasi yang diadopsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada yang menjadi esensi kehidupan bernegara Indonesia dan Filipina. Indonesia dan Filipina akhirnya merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir sebuah inovasi sehingga saat ini sistem hukum tidak lagi menjadi penghambat dalam melaksanakan inovasi akuntansi pemerintahan.

3. Kualifikasi Akuntan

Akuntan adalah orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Akuntan sangat dibutuhkan dalam merumuskan peraturan dan kebijakan dibidang akuntansi. Tanpa akuntan yang kompeten, maka negara akan kesulitan merumuskan sistem akuntansi yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara. Akuntan yang tidak kompeten menghambat proses inovasi akuntansi pemerintahan sehingga dibutuhkan dorongan agar akuntan semakin profesional sehingga dapat memberikan nilai informasi dan keputusan ekonomi yang berguna bagi pengembangan sistem akuntansi di Indonesia dan Filipina. Cara yang dapat ditempuh dapat melalui sertifikasi akuntan secara nasional maupun internasional.

4. Ukuran Yurisdiksi

Ukuran yurisdiksi dapat menghambat proses inovasi karena berkaitan dengan pembagian kekuasaan suatu negara dalam pengambilan keputusan tertentu. Indonesia dan Filipina yang sama-sama terbagi dalam tiga kekuatan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki birokrasi yang harus diterapkan secara berjenjang dalam proses adopsi inovasi. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas serta komunikasi yang baik hambatan yurisdiksi ini dapat diatasi sehingga prosesi inovasi dapat berjalan dengan lancar.

4.4 Luder's Contingency Model dalam Kebijakan Utang Luar Negeri

1). Manajemen Utang Luar Negeri Indonesia

Utang luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Utang luar negeri dikelompokkan dalam beberapa jenis sumber dana: Negara asing, Lembaga Multilateral, Lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, dan Lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengakuan utang Luar Negeri adalah saat dana pinjaman diterima. Pengukuran Utang Luar Negeri dicatat sebesar nilai nominal sesuai yang tertera dalam surat utang pemerintah. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Penyajian dan Pengungkapan utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Ada dua sektor kebijakan yang diperhatikan Pemerintah Untuk Mengatasi Masalah Utang Luar Negeri, yaitu : kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi makro dan dalam sektor ekonomi mikro. Sektor Ekonomi makro menganalisis masalah tentang keseluruhan kegiatan perekonomian sedangkan sektor ekonomi mikro menganalisis mengenai bagian – bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Kebijakan makro untuk mengatasi utang luar negeri adalah pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan Internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Manajemen utang luar negeri Indonesia dibagi menjadi beberapa masa sesuai dengan Presiden yang memimpinnya, antara lain :

Tabel 4.1. Manajemen Utang Luar Negeri Indonesia

No.	Kepemimpinan Presiden	Manajemen Utang Luar Negeri
1.	Orde Lama – Presiden Soekarno	Pemerintah sangat berhati-hati dalam melakukan utang luar negeri karena dikhawatirkan penggunaan utang luar negeri sebagai sarana kembalinya kolonialisme. Semangat kemerdekaan masih amat kental, sehingga mereka peka dalam masalah yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Akibatnya, persyaratan yang ketat ditetapkan dalam setiap perundingan berutang kepada pihak luar negeri. Ini berlaku juga terhadap masalah penanaman modal asing, termasuk perundingan mengenai tambang dan kilang minyak di wilayah Indonesia. Pada masa orde lama, Indonesia keluar dari keanggotaan IMF.
2.	Orde Baru – Presiden Soeharto	sikap pemerintahan Soeharto terhadap modal asing berbeda dengan sikap Soekarno-Hatta. Sebagai contoh, undang-undang pertama yang ditandatangani Soeharto adalah UU no.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang isinya bersifat terbuka dan bersahabat bagi masuknya modal dari negara manapun. Beberapa bulan sebelumnya, IMF membuat studi tentang program stabilitas ekonomi, yang rekomendasinya segera diikuti oleh pemerintah. Indonesia juga telah secara resmi kembali menjadi anggota IMF. Seiring dengan itu, perundingan serius mengenai utang luar negeri Indonesia berlangsung lancar. Kembalinya Indonesia menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, seketika disambut oleh negara-negara barat berupa: pemberian hibah, restrukturisasi utang lama, komitmen utang baru dan pencairan utang baru yang cepat. Hibah bertujuan untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Restrukturisasi utang yang disetujui melalui berbagai perundingan, terutama pertemuan Paris Club, disepakati moratorium utang sampai dengan tahun 1971 untuk pembayaran cicilan pokok sebagian besar utang. Akhirnya, sejak tahun 1967 Indonesia mendapat persetujuan utang baru dari banyak kreditur.
3.	Era Reformasi – Presiden BJ. Habibie	Langkah pertama yang dilakukan BJ Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi Indonesia antara lain mendapatkan kembali dukungan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Untuk mewardahi reformasi ekonomi telah diberlakukan beberapa Undang-Undang yang mendukung persaingan sehat, seperti UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat dan UU Perlindungan Konsumen.
4.	Era Reformasi – Presiden Abdurrahman Wahid	Utang Luar Negeri menurun tajam saat pemerintahan Gusdur bahkan gusdur dianugerahi rekor Muri atas prestasinya itu.
5.	Era Reformasi - Presiden Megawati Soekarno Putri	Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak terjadi kenaikan utang luar negeri. Tidak melejitnya utang luar negeri di masa Megawati terjadi akibat kebijakan privatisasi beberapa BUMN dan saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintah sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI dengan nilai penjualan sekitar 20% dari total nilai BLBI. Selama kurang lebih tiga tahun pemerintahan Megawati melakukan privatisasi BUMN.
6.	Era Reformasi – Susilo Bambang Yudhoyono	Pada masa pemerintahan SBY, terjadi pelunasan hutang kepada IMF. Namun hutang negara tetap besar karena mengalihkan pinjaman luar negeri menjadi utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) dengan bunga yang lebih mahal, hutang bilateral atau hutang ke institusi keuangan global lainnya seperti World Bank dan ADB.
7.	Era Reformasi – Presiden Joko Widodo	Belum banyak yang bisa dikatakan karena pemerintahan Jokowi-JK baru berjalan. Namun, Pemerintah Jokowi-JK telah melakukan penarikan pinjaman proyek sebesar Rp 4,10 triliun selama periode Januari-Maret 2015. Pinjaman proyek dilakukan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur.

2). Manajemen Utang Luar Negeri Filipina

Utang Luar Negeri adalah jumlah utang negara berutang kepada kreditur asing atau internasional. Debitur bisa pemerintah, perusahaan atau warganegara Filipina. Filipina menggunakan utang luar negeri sebagai mekanisme untuk mengatasi kesenjangan antara tabungan domestik, investasi yang diinginkan dan kesenjangan ekspor-impor. Kreditur utama Filipina adalah *International Monetary Fund* (IMF). Utang luar negeri Filipina digolongkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan waktu jatuh tempo (utang jangka menengah dan jangka panjang);
- b. Berdasarkan jenis kreditur (multilateral, bilateral, komersial, surat utang luar negeri);
- c. Berdasarkan jenis surat berharga (Pinjaman, obligasi US Dollar / catatan, Eurobonds, obligasi Yen, Peso mata uang obligasi)
- d. Berdasarkan jenis mata uang (dolar AS, Yen Jepang, Euro, Franc Perancis, Deutsche Mark, PhP, mata uang lainnya)
- e. Berdasarkan jenis Kewajiban (Liabilities langsung seperti pinjaman dan surat berharga utang luar negeri, Kewajiban Diasumsikan)

Manajemen utang luar negeri Filipina dibagi menjadi beberapa masa sesuai dengan Presiden yang memimpinya, antara lain :

Tabel 4.2. Manajemen Utang Luar Negeri Filipina

No.	Kepemimpinan Presiden	Manajemen Utang Luar Negeri
1.	Ferdinand Marcos (1965-1986)	Utang Luar Negeri meningkat tajam karena kebijakan liberalisasi ekonomi yang diterapkan. Pengaturan kredit siaga dengan dana dari IMF. Di bawah UU 6142 tahun 1970, semua utang luar negeri oleh publik dan sektor swasta (kecuali bank umum), harus disetujui oleh Dewan Moneter. <i>The Management of External Debts and Investment Accounts Department (MEDIAD)</i> mengawasi semua utang luar negeri dan membuat statistik utang luar negeri. Harga minyak dunia yang meningkat tajam dan utang luar negeri yang terlalu tinggi membuat Marcos tidak mampu melakukan pembayaran dan puncaknya terjadi depresiasi mata uang peso terhadap dollar Amerika sehingga akhirnya Filipina mengalami krisis ekonomi pada tahun 1986 – 1987.
2.	Corazon Aquino (1986-1992)	Corazon Aquino mewarisi utang luar negeri sejak zaman Marcos. Pada awalnya cory menolak membayar utang yang dilakukan saat rezim Marcos, Bank Dunia menentang penolakan cory karena dianggap tidak menghormati utang. Akibatnya hilangnya bantuan keuangan / dukungan dari negara-negara asing yang dibutuhkan Filipina dan beberapa pejabat mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya jika Cory tetap menolak utang. Pada akhirnya, Cory memutuskan untuk menghormati utang dan melakukan pendekatan kooperatif dengan para krediturnya, menegosiasi untuk menurunkan suku bunga dan menjadwalkan ulang utang negara yang jatuh tempo. IMF dan bank-bank komersial merespon positif kebijakan Cory sehingga Philipina untuk masuk dalam " <i>Brady Plan</i> " yang memungkinkan pemerintah untuk menggunakan dana untuk membeli kembali \$ dengan diskon 50%, menjadwalkan ulang utang yang jatuh tempo dan membuka utang baru.
3.	Fidel V. Ramos (1992-1998)	Ramos mampu mengangkat perekonomian negara melalui fokus pada pemberdayaan masyarakat dan daya saing global. sehingga Philipina dijuluki " <i>Tiger Cub Economies</i> " di Asia dengan pertumbuhan dan kemakmuran terus-menerus. Inflasi terus menurun dari 20% menjadi 5%. Ramos mencoba untuk mengendalikan utang melalui restrukturisasi utang dan pengelolaan fiskal. Ramos membentuk Republik Act 7653, lebih dikenal sebagai " <i>New Central Bank Act</i> " untuk mendorong perdagangan luar negeri dan investasi yang meningkat arus modal. Dengan pembentukan kembali akses ke pasar utang, penerbitan obligasi pemerintah dalam mata uang asing mampu membiayai pemulihan negara selama krisis tahun 1997.
4.	Joseph Ejercito Estrada (1998-2001)	Perekonomian menurun karena kenaikan harga minyak dunia, utang luar negeri yang meningkat tajam, tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, adanya konflik dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF), citra negara Philipina yang buruk, kepercayaan masyarakat yang rendah, pengusaha dan investor asing menurun karena banyaknya serangan militer, korupsi dan manipulasi pasar saham yang dilakukan oleh Presiden Ekstrada. Kebijakan kontraktif yang diterapkan untuk memotong pengeluaran pemerintah belum mampu memperbaiki kondisi perekonomian yang ada. Presiden Ekstrada akhirnya diberhentikan dari jabatannya karena ketidakmampuannya mengatasi segala permasalahan yang ada.
5.	Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010)	Utang Luar Negeri meningkat. Arroyo melakukan korupsi dan suap sehingga terjadi jumlah defisit yang besar. Arroyo kemudian menerapkan kebijakan alokasi otomatis yang akan mengalokasikan dana untuk pembayaran utang dan kebijakan perampasan anggaran yaitu bahwa sebagian dari anggaran pemerintah untuk pelayanan sosial dipotong untuk mengakomodasi pembayaran utang luar negeri. Sehingga mengganggu sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur negara. Arroyo meningkatkan pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai dan meningkatkan cukai untuk mengatasi defisit.
6.	Benigno Aquino (2010-sekarang)	Selama Pemerintahan Benigno, Filipina menjadi negara kreditor dan bergabung bersama IMF. Manajemen Utang Luar Negeri Philipina adalah melakukan penjadwalan utang yang jatuh tempo menjadi Utang jangka panjang, melakukan revaluasi nilai mata uang dan perdagangan kredit.

4.5 *Stimuli, User, Producer, dan Barrier Utang Luar Negeri Indonesia dan Filipina*

- *Stimuli* : Indonesia dan Filipina adalah sama-sama negara debitur IMF. Utang Indonesia dan Filipina kepada IMF dan Kreditur lainnya menyebabkan adanya campur tangan asing dalam perekonomian Indonesia dan Filipina karena IMF dan kreditur lainnya memberikan komitmen bantuan bukan tanpa prasyarat, IMF bersedia memberikan pinjaman dengan prasyarat tertentu (kondisionalitas) yang mengharuskan pemerintah Indonesia ataupun Filipina mematuhi berbagai persyaratan yang dicantumkan dalam butir-butir yang tercantum dalam Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*). Persyaratan tertentu yang dimaksud antara lain :
 - a. Pemangkasan belanja atau pengetatan anggaran,
 - b. Mengutamakan ekspor langsung dan ekstraksi sumber daya,
 - c. Devaluasi mata uang
 - d. Liberalisasi perdagangan, atau penghapusan hambatan impor dan ekspor,
 - e. Meningkatkan kestabilan investasi (membantu investasi asing langsung dengan membuka bursa saham dalam negeri),
 - f. Menyeimbangkan anggaran dan tidak belanja berlebihan,
 - g. Menghapus pengendalian harga dan subsidi negara,
 - h. Swastanisasi/privatisasi, atau divestasi seluruh atau sebagian BUMN,
 - i. Memperluas hak investor asing dalam perundang-undangan nasional,
 - j. Memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas korupsi.
- *Users* : pengguna informasi utang adalah IMF dan para Kreditur lainnya. IMF menerbitkan *The Public Sector Debt Statistics-Guide for Compilers and Users* (PSDSG) untuk memberikan panduan yang komprehensif untuk pengukuran, kompilasi, penggunaan analisis, dan penyajian statistik utang sektor publik.
- *Producers* : penyedia informasi utang adalah Indonesia dan Filipina. Indonesia dan Filipina harus menyusun kebijakan sesuai dengan Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) dan *The Public Sector Debt Statistics-Guide for Compilers and Users* (PSDSG) dari IMF agar dapat diterapkan di Indonesia dan Filipina sehingga dapat menghasilkan informasi utang seperti yang diinginkan users/kreditur.
- *Barriers* : Karakteristik Organisasi, Sistem Hukum, Kualifikasi Akuntan dan Ukuran Yurisdiksi. Karakteristik organisasi bahwa negara tidak suka berhutang, Sistem Hukum adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait utang luar negeri, Kualifikasi akuntan terkait perhitungan utang luar negeri, Ukuran Yurisdiksi terkait birokrasi dalam penyelesaian utang luar negeri.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

5.1. Kesimpulan

Utang luar negeri Indonesia lebih besar daripada utang luar negeri Filipina. Utang Eksternal Indonesia berada diperingkat 32 dunia, sedangkan Filipina berada diperingkat 52 dunia. Indonesia lebih banyak mengandalkan utang jangka panjang sedangkan Filipina lebih banyak mengandalkan utang jangka pendek.

Kebijakan utang luar negeri Indonesia adalah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan Internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Kebijakan utang luar negeri Filipina adalah membatasi akses ke pasar pinjaman eksternal, pemanjangan jatuh tempo utang, mengurangi tingkat suku bunga, pembiayaan kembali utang luar negeri yang ada, pemantauan utang jangka pendek untuk entitas disektor perbankan maupun diluar entitas perbankan, Konsentrasi pada utang jangka menengah dan jangka panjang.

Luder Contingency Model yang dibuat dapat memperbandingkan reformasi akuntansi Pemerintahan Indonesia dengan reformasi akuntansi Pemerintahan Filipina. Dengan stimuli yang sama, user dan producer yang sama dan barrier yang hampir sama pula. Dengan mempelajari Luder Contingency Model diharapkan mampu meningkatkan inovasi akuntansi pemerintahan sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang lebih informatif dan akuntabel terutama berkaitan dengan informasi utang luar negeri.

5.2. Implikasi Penelitian

Luder's Contingency Model dapat menjadi paradigma dalam menganalisis setiap permasalahan ekonomi yang melibatkan akuntansi didalamnya. Pemerintah dapat mempertimbangkan Luder Contingency Model dalam membuat kebijakan utang luar negeri terutama terkait dengan mengatasi *barrier* yang ada.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya melihat kebijakan utang luar negeri secara global tanpa melihat dampaknya terhadap peningkatan atau penurunan utang luar negeri. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji kebijakan utang luar negeri secara kuantitatif dengan melihat pengaruh dari *Luder Contingency Model*.

5.4. Saran

Indonesia dan Filipina sebaiknya mengintensifkan program-program terkait pemberdayaan masyarakat agar dapat diperoleh sumber-sumber penerimaan baru yang dapat menambah penerimaan atau pendapatan negara sehingga Indonesia dan Philipina tidak terus menerus menambah utangnya dari waktu ke waktu. Indonesia dan Filipina dapat menerapkan “*Debt Management Strategy*” dan “*Debt Management Performance Assessment (DeMPA)*” yang dikembangkan oleh Worldbank. “*Debt Management Strategy*” yaitu sebuah strategi pengelolaan utang adalah bagian kunci dari manajemen ekonomi yang menyediakan kerangka kerja untuk manajer yang melakukan utang untuk memenuhi tujuan melakukan utang dan memastikan bahwa kebutuhan pembiayaan pemerintah dan kewajiban pembayaran terpenuhi dengan biaya serendah mungkin untuk jangka menengah sampai jangka panjang dengan konsisten dan tingkat kehati-hatian terhadap resiko ketidakmampuan membayar. Dengan strategi ini diharapkan dapat memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang bersumber dari utang. *Debt Management Performance Assessment (DeMPA)* adalah sebuah program dari Worldbank untuk mengevaluasi semua proses manajemen utang pemerintah mulai dari perencanaan utang, persetujuan utang, pelayanan utang, dan pelaporan utang.

Reference

- Agnello, L., & Sousa, R. M. 2015. Can re-regulation of the financial sector strike back public debt? *Economic Modelling*, 51, 159-171.
- Akram, N. 2015. Is public debt hindering economic growth of the Philippines? *International Journal of Social Economics*, 42(3), 202-221.
- Alam, N., & Taib, F. M. 2013. An Investigation of the Relationship of External Public Debt with Budget Deficit, Current Account Deficit, and Exchange Rate Depreciation in Debt Trap and Non-Debt Trap Countries. *European Scientific Journal*, 9(22).
- Atmadja, A. S. 2004. Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), pp. 83-94.
- Azam, M., Emirullah, C., Prabhakar, A. C., & Khan, A. Q. 2013. The Role of External Debt in Economic Growth of Indonesia-A Blessing or Burden? *World Applied Sciences Journal*, 25(8), 1150-1157.
- Karnow, S. (2010). *In Our Image: America's Empire in the Philippines*: Random House Publishing Group.
- Mahdavi, S. 2004a. Shifts in the Composition of Government Spending in Response to External Debt Burden. *World Development*, 32(7), 1139 - 1157.
- Mahdavi, S. 2004b. Shifts in the composition of government spending in response to external debt burden. *World Development*, 32(7), 1139-1157.
- Motley, B. 1994. Ricardo or Keynes: does the government debt affect consumption? *David Ricardo: Critical Assessments: Second Series*, 10.
- Panizza, U. (2008). *Domestic and external public debt in developing countries*. Paper presented at the United Nations Conference on Trade and Development Discussion Paper.
- Parayno, P. P., & Saeed, K. 1993. The dynamics of indebtedness in developing countries: The case of the Philippines. *Socio-Economic Planning Sciences*, 27(4), 239-255.
- Qin, D., Cagas, M. A., Ducanes, G., Magtibay-Ramos, N., & Quising, P. 2006. Empirical assessment of sustainability and feasibility of government debt: The Philippines case. *Journal of Asian Economics*, 17(1), 63-84.
- Radelet, S. 2000. Indonesia: long road to recovery. *Weathering the storm: Taiwan, its neighbors, and the Asian financial crisis*, 39-70.
- Remolona, E. M., Mangahas, M., & Pante, F. 1986. Foreign debt, balance of payments, and the economic crisis of the Philippines in 1983-1984. *World Development*, 14(8), 993-1018.
- Robison, R., & Rosser, A. 1998. Contesting reform: Indonesia's new order and the IMF. *World Development*, 26(8), 1593-1609.
- Rogers, Everett M, 1995, *Diffusions of Innovations, Forth Edition*. New York: Tree Press.
- Shabbir, S., & Yasin, H. M. 2015. Implications of Public External Debt for Social Spending: A Case Study of Selected Asian Developing Countries. *The Lahore Journal of Economics*, 20(1), 71 - 103.
- Shabbir, S., & Yasin, H. M. 2015. Implications of Public External Debt for Social Spending: A Case Study of Selected Asian Developing Countries. *The Lahore Journal of Economics*, 20(1), 71.
- Sotocinal, N. R. 2015. Regime Switching in Inflation Targeting Under Conditions of Public Debt in the Philippines. *Philippine Management Review*, 22.
- Vaughn, S. C. (1978). *Foreign Aid: Its Impact on Indonesian Political Development, 1950-1972*. (Doctor of Philosophy Dissertation), Howard University, Washington, D.C.
- Wade, R. 1998. The Asian debt-and-development crisis of 1997-?: Causes and consequences. *World Development*, 26(8), 1535-1553.
- Wardhono, A., & Qoriah, C. G. 2014. The Effects of European Bilateral Debt Crisis on International Banking Finance Behavior in The Philippines and Indonesia. *International Journal*, 8(3), 41-51.
- Kementerian Keuangan RI. 2016. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Publikasi Maret 2016
- Bankge Sentral NG Philippines. 2015. External Debt Philippines Publikasi 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan

<http://www.gov.ph/about/gov/>

<http://www.dof.gov.ph/>

<http://pfm.gov.ph/>

<http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=94>

LAMPIRAN 1

Lampiran 1. Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 2015

Tabel I.5

Posisi Utang Luar Negeri Menurut Jangka Waktu Asal dan Kelompok Peminjam
External Debt Position by Original Maturity and Group of Borrower

(Juta USD / Million of USD)

		2010	2011	2012	2013	2014*	2015*										2016	
							Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan*	Feb**
1. Utang Jangka Pendek / Short Term Debt ≤ 1 tahun / Year	Pemerintah / Government	1.496	1.585	890	748	822	1.069	1.016	1.091	1.100	809	633	620	612	825	682	583	603
	Bank Sentral / Central Bank	8.134	2.691	6.525	5.961	2.838	1.970	1.914	2.196	2.163	2.066	2.199	2.147	2.141	2.167	2.327	2.125	2.138
	Swasta / Private	23.417	33.897	36.839	36.031	41.412	38.644	39.113	40.106	39.830	40.179	40.001	38.595	36.489	36.389	36.744	35.966	35.551
	Total	33.047	38.173	44.253	42.739	45.072	41.683	42.042	43.394	43.094	43.053	42.833	41.362	39.242	39.382	39.754	38.675	38.292
2. Utang Jangka Panjang / Long Term Debt > 1 tahun / Year	Pemerintah / Government	105.364	110.842	115.297	113.546	122.983	126.754	126.944	127.348	128.344	128.662	128.148	128.444	130.895	131.821	136.714	137.764	141.185
	Bank Sentral / Central Bank	3.630	3.524	3.407	3.294	3.092	2.963	2.990	2.975	2.992	2.974	3.002	2.996	2.973	2.933	2.937	2.928	2.942
	Swasta / Private	60.372	72.835	89.407	106.530	122.123	127.595	127.916	128.556	129.680	129.189	129.233	128.805	129.633	129.754	130.046	128.666	129.069
	Total	169.366	187.201	208.111	223.370	248.198	257.312	257.850	258.879	261.017	260.826	260.383	260.245	263.501	264.509	269.696	269.358	273.196
TOTAL (1 + 2)	Pemerintah / Government	106.860	112.427	116.187	114.294	123.806	127.823	127.959	128.439	129.444	129.471	128.781	129.063	131.507	132.646	137.396	138.347	141.788
	Bank Sentral / Central Bank	11.764	6.215	9.932	9.255	5.930	4.933	4.904	5.171	5.155	5.041	5.202	5.143	5.113	5.100	5.264	5.054	5.081
	Swasta / Private	83.789	106.732	126.245	142.561	163.535	166.239	167.029	168.663	169.510	169.368	169.233	167.400	166.123	166.144	166.791	164.633	164.620
	TOTAL	202.413	225.375	252.364	266.109	293.270	298.995	299.892	302.273	304.110	303.879	303.216	301.607	302.743	303.891	309.450	308.034	311.489

Sumber : Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Maret 2016

LAMPIRAN 2

Lampiran 2. Utang Luar Negeri Filipina Tahun 2015

SDDS: External Debt In Million USD philippines							
	Dec-2009	Dec-2010	Dec-2011	Dec-2012	Dec-2013	Dec-2014	Dec-2015
1. General Government	<u>32,190</u>	<u>35,688</u>	<u>36,117</u>	<u>35,337</u>	<u>31,755</u>	<u>31,448</u>	<u>30,812</u>
a. Short-term							
1. Bonds and notes							
b. Long-term	32,190	35,688	36,117	35,337	31,755	31,448	30,812
1. Bonds and notes	14,194	16,606	16,341	16,605	15,890	16,220	14,611
2. Trade credits							
3. Loans	17,996	19,083	19,776	18,733	15,865	15,228	16,201
2. Monetary Authorities	<u>1,515</u>	<u>1,459</u>	<u>1,465</u>	<u>1,451</u>	<u>1,455</u>	<u>1,387</u>	<u>1,337</u>
a. Short-term							
1. Loans							
2. Deposits							
b. Long-term	1,515	1,459	1,465	1,451	1,455	1,387	1,337
1. Bonds and notes	201	175	173	159	167	173	172
2. Loans							
3. Deposits							
4. Use of IMF credits							
5. Other debt liabilities ^{2/}	1,313	1,285	1,293	1,292	1,288	1,214	1,165
3. Banks	<u>7,673</u>	<u>11,001</u>	<u>13,085</u>	<u>17,163</u>	<u>17,286</u>	<u>17,195</u>	<u>17,525</u>
a. Short-term	4,271	7,369	8,973	13,146	13,663	13,171	12,291
1. Loans	3,377	6,253	7,787	12,187	11,749	11,124	10,948
2. Deposits	894	1,116	1,187	959	1,914	2,047	1,342
b. Long-term	3,402	3,632	4,112	4,017	3,623	4,025	5,234
1. Bonds and notes ^{3/}	429	556	797	1,202	1,159	1,109	1,468
2. Loans	2,883	3,000	3,219	2,785	2,436	2,868	3,594

3. Deposits	90	75	95	31	28	48	172
4. Other Sectors	<u>21,389</u>	<u>23,636</u>	<u>23,050</u>	<u>24,165</u>	<u>24,476</u>	<u>23,932</u>	<u>24,073</u>
a. Short-term	2,219	3,143	3,077	3,306	3,246	3,077	2,808
1. Bonds and notes							
2. Trade credits	1,771	2,817	2,674	2,898	2,680	2,362	2,098
3. Loans	448	326	403	408	566	715	710
b. Long-term	19,170	20,494	19,973	20,859	21,230	20,854	21,265
1. Bonds and notes	6,371	6,614	6,773	7,224	7,452	7,505	6,738
2. Trade credits	667	785	876	1,057	1,028	1,010	684
3. Loans	12,132	13,095	12,324	12,578	12,750	12,339	13,843
5. Direct investment: Intercompany lending	<u>1,972</u>	<u>1,809</u>	<u>1,852</u>	<u>1,833</u>	<u>3,516</u>	<u>3,711</u>	<u>3,727</u>
1. Loans	1,972	1,809	1,852	1,833	3,516	3,711	3,727
Total	<u>64,738</u>	<u>73,594</u>	<u>75,569</u>	<u>79,949</u>	<u>78,489</u>	<u>77,674</u>	<u>77,474</u>

Source: International Operations Department, Bangko Sentral NG Philippines
<http://www.bsp.gov.ph/statistics/sdds/extdebt.htm>

Sumber : Bangko Sentral NG Philippines, 2015